

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2018 TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi hukum atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Atas Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 687);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggung Jawab dan Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil analisis dan evaluasi hukum.
2. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertugas melakukan kegiatan:
 - a. menganalisis Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ada terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. mengevaluasi implementasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ditetapkan; dan
 - c. menganalisis Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ditetapkan untuk dilakukan perubahan atau pencabutan.

KETIGA : Tim Analisis dan Evaluasi Hukum bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 154 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 Desember 2024

**TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS PERATURAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2018 TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim		Nama/ Jabatan
1.	Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua Tim	:	Rinaldi Morintoh
3.	Anggota	:	1. Rasmita Juliana Sitepu 2. Inamawati Mastuti Dewi 3. Asih Riska Nurmasari 4. Carolina Maria Anggreini 5. Yogie Prastiyans 6. Apriliansyah Ariyoga 7. Salwa Nida 8. Adinda Puspa Hartanto

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN